YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i4.5813

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI NAGARI GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Implementation of Post-Flood Disaster Rehabilitation and Reconstruction Program in Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, Sutera District, Pesisir Selatan Regency

Irsan Rahmat Putra & Adil Mubarak
Universitas Negeri Padang
irsnptr@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 6, 2025	Apr 27, 2025	May 12, 2025	May 17, 2025

Abstract

Post flood rehabilitation and reconstruction programs in various regions often face challenges in their implementation, yet in depth studies at the *nagari* level remain limited. This study aims to analyze the implementation of post disaster rehabilitation and reconstruction programs in Nagari Ganting Mudiak Utara, Sutera Subdistrict, Pesisir Selatan Regency. A descriptive qualitative approach was used, with participants including *nagari* officials, representatives from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and affected community members. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that the rehabilitation program includes social, psychological, and economic recovery, with high community participation. However, limited facilities and human resources are

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

the main obstacles. Meanwhile, the reconstruction program focused on rebuilding basic infrastructure such as roads, bridges, and residents' homes, which was carried out gradually by the local government. Budget constraints and bureaucratic processes slowed down its implementation. The conclusion of this study is that although the program has shown positive outcomes, more comprehensive planning, strengthened interagency coordination, and enhanced implementation capacity are needed so that post disaster response efforts can be more effective, efficient, and sustainable.

Keywords: Implementation; Rehabilitation; Reconstruction; Post Disaster; Flood; Nagari Ganting Mudiak Utara

Abstrak: Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di berbagai wilayah sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya, namun kajian mendalam di tingkat nagari masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Nagari Ganting Mudiak Utara, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan partisipan meliputi aparat nagari, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat terdampak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi meliputi pemulihan sosial, psikologis, dan ekonomi, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Sementara itu, program rekonstruksi difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan rumah warga yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran dan proses birokrasi memperlambat pelaksanaannya. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun program menunjukkan capaian positif, dibutuhkan perencanaan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas pelaksana agar upaya penanggulangan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi; Rehabilitasi; Rekonstruksi; Pasca Bencana; Banjir; Nagari Ganting Mudiak Utara.

PENDAHULUAN

Bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami, dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun non-materiil bagi daerah dan masyarakat yang terdampak (Aji & Wismaningtyas, 2024; Septian et al., 2020; Widyaningrum et al., 2020) . Selain itu, bencana alam juga dapat mengancam kehidupan masyarakat, merusak lingkungan, dan menimbulkan dampak psikologis yang signifikan (Oktavianto et al., 2025).

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor

(Arif, 2019; Zulsfi et al., 2021). Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana (PB) Sumatera Barat periode 2014-2022, tercatat 6.274 kejadian bencana yang melanda 19 kabupaten/kota di provinsi ini. Dari jumlah tersebut, angin kencang mendominasi dengan 41,9% dari total kejadian, diikuti oleh longsor (30,8%), dan banjir (22,0%). Berdasarkan data Pusdalops Provinsi Sumatera Barat, kejadian bencana di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian banjir dan tanah longsor selama periode 2021-2022 (Tambajong et al., n.d.).

Pada 7 Maret 2024, bencana banjir dan longsor yang parah kembali melanda wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Banjir dan longsor terjadi di beberapa titik sepanjang ruas jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Bengkulu, menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan serta mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Tingginya curah hujan pada Kamis, 7 Maret memicu banjir di sebagian besar wilayah Pesisir Selatan. Dari 15 kecamatan, hanya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Lunang yang tidak terdampak. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) peristiwa nahas tersebut mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Banjir turut merusak sedikitnya 5.702 rumah. Sebanyak 4.100 unit diantaranya rusak ringan, 1.161 unit rusak sedang dan 537 unit lainnya terkonfirmasi mengalami rusak berat. Tercatat 9 ruas jalan rusak dan 20 unit jembatan yang mengalami rusak, terdiri dari 11 unit jembatan gantung, 7 unit jembatan beton dan 2 unit lainnya merupakan jembatan rangka. Banjir turut merusak 10 pengaman tebing sungai di Pesisir Selatan dan sebanyak 37 daerah irigasi. Sedikitnya 26 daerah irigasi mengalami rusak ringan dan 11 sisanya terpantau rusak berat. Selain itu merendam 6.982 Hektare lahan pertanian masyarakat yang terdiri dari 5.900 Hektare sawah dan seluas 892 Hektare lahan palawija. 5.016 ekor ternak hanyut, 444 ekor ternak besar dan sisanya ternak kecil. Kemudian turut merusak sedikitnya 20 tambak udang dan kolam ikan masyarakat, dengan rincian 12 tambak dan kolam rusak berat dan 8 tambak lainnya tercatat rusak ringan.

Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih terletak di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Bunda et al., 2022; FEBRA, 2019; Gustiawan et al., 2024). Luas wilayahnya mencapai 49,36 kilometer persegi, yang merupakan sekitar 11,08 persen dari total luas Kecamatan Sutera. Puluhan rumah di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, Kecamatan Sutera Sumbar, rusak berat diterjang air sejak 7 Maret lalu. Wali Nagari Ganting Mudik Utara Sutera, Zuhaldi, menyebut banjir itu juga merusak lahan pertanian. "Ada sekitar 80 rumah lebih yang rusak berat dan hilang dibawa arus banjir. Saya lupa berapa totalnya,"

katanya kepada Tempo, Selasa, 12 Maret 2024. akses menuju Kampung Langgai juga terputus karena dua jembatannya hancur. Sejauh ini penyaluran bantuan diupayakan secara swadaya atau mandiri oleh masyarakat lokal. (sumber dari tempo.com, diakses pada 11 desember 2024)

Namun, proses pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan berjalan lambat khusunya pada Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dengan banyak korban banjir yang masih mengungsi dan belum mendapatkan bantuan pemulihan yang memadai dari pemerintah daerah. Lambannya proses pemulihan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Naibaho et al., 2025). Lalu, pada layanan psikosial bagi keluarga korban bencana masih sangat terbatas (Sakban et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak hanya memerlukan respon yang cepat dan tepat, tetapi juga kebijakan yang terencana dan terstruktur dengan baik (Fatima & Sudibyo, 2023; Ritonga, 2024).

Namun demikian , masih banyak ditemukan beberapa permasalahan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di nagari Ganting Mudiak Utara Surantih yang sampai saat ini belum optimal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut :

Pertama, lambatnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pesisir selatan dalam melakukan perencanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor hingga 5 April 2024. Yang kedua, terhambatnya koordinasi antar pemerintahan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang ketiga, tidak adanya penggunaan teknologi dalam proses pemetaan dan pendataan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang keempat, tidak adanya layanan psikososial, terutama untuk kelompok rentan (perempuan dan lansia) yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah yang terdampak langsung oleh bencana banjir dan menjadi pusat pelaksanaan program pasca bencana. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012), sehingga informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Juni 2024-Januari 2025. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pendukung, serta observasi langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata dari pelaksanaan program. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, agar data yang diperoleh dapat disederhanakan, dipahami, dan dianalisis secara sistematis. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber serta metode yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), guna meningkatkan validitas hasil penelitian dan menjaga objektivitas dalam interpretasi data.

HASIL

1. Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan tahap awal dalam pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang terdampak bencana, baik dari segi infrastruktur, sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan psikologis. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi di wilayah terdampak melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD Kabupaten Pesisir Selatan,

Pemerintah Kecamatan Sutera, Pemerintah Wali Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, serta masyarakat yang berperan aktif dalam upaya pemulihan.

Pada penelitian ini, penulis membahas beberapa temuan yang penulis temukan di lapangan. Khususnya di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih yang dimana proses rehabilitasi dilakukan. Adapun beberapa Langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Perbaikan Infrastruktur Dasar

Pemerintah daerah bersama BPBD Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki infrastruktur yang terdampak, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan,fasilitas pendidikan serta jaringan air bersih. Namun, beberapa daerah masih mengalami keterbatasan akses akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir membuat distribusi bantuan serta mobilitas masyarakat menjadi terhambat.

Menurut Wali Nagari Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kabupaten Pesisir Selatan bapak Zulhadi tentang beberapa sarana dan prasarana yang sudah dilakukan rehabilitasi sebagai berikut :

> " …Saat ini, Pemerintah Daerah bersama BPBD serta kecamatan dan nagari telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak. Sejumlah proyek perbaikan, seperti jembatan, masjid, mushalla, dan sekolah, sudah berjalan dan beberapa bahkan telah selesai…" (Wawancara,21 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut, pemerintah bersama pihak terkait berupaya melakukan perbaikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak di wilayah terdampak. Meski demikian, keterbatasan anggaran serta kondisi cuaca yang kurang mendukung sering kali menjadi kendala dalam percepatan proses perbaikan infrastruktur ini.

Kebijakan rehabilitasi diinterpretasikan sebagai upaya untuk memulihkan fungsi-fungsi dasar kehidupan masyarakat. Ini dibuktikan dengan prioritas pada pembangunan jembatan dan fasilitas pendidikan sebagai akses vital masyarakat pasca bencana.

2) Pemulihan Ekonomi dan Mata Pencaharian

Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian. Sawah yang terendam air banjir mengakibatkan

petani mengalami kerugian besar, bahkan beberapa harus memulai usahanya dari nol. Untuk membantu pemulihan ekonomi, pemerintah memberikan bantuan berupa modal usaha, distribusi bibit tanaman agar masyarakat terdampak dapat kembali bekerja dan mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Iwal, S.Pt selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sutera mengatakan sebagai berikut :

> "… Memang, sektor pertanian dan perikanan adalah sektor yang paling terdampak oleh bencana banjir ini. Banyak petani yang sawahnya terendam air, begitu juga dengan nelayan yang tambaknya rusak. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar dan harus memulai usaha dari nol. Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan yang diperlukan, agar mereka dapat kembali bekerja dan mandiri secara ekonomi…" (Wawancara,21 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas, Nagari yang bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan modal usaha bagi Masyarakat yang terdampak, yang memiliki usaha. Dan terutama, pada sektor pertanian juga diberikan bantuan berupa bibit tanaman dan pupuk untuk memulihkan sektor pertanian.

3) Bantuan Kesehatan dan Psikososial

Selain bantuan fisik, layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga menjadi bagian penting dalam rehabilitasi. Tim medis telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi korban bencana, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Banyak warga mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan yang kurang higienis pasca banjir. Pemerintah dan tenaga medis telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan darurat serta bantuan obat-obatan bagi warga yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Iwal, S.Pt selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sutera mengatakan sebagai berikut :

> "… Dari dinas kesehatan telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi masyarakat terdampak, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Kami mendirikan beberapa pos kesehatan darurat di titik-titik yang sangat terdampak, seperti di dekat Kantor Wali Nagari yang mengalami kerusakan. Di pos tersebut, kami

memberikan layanan pengobatan, serta distribusi obat-obatan untuk penyakit umum seperti diare, flu, dan infeksi kulit…" (Wawancara, 21 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, pemerintah bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam pemeriksaan Kesehatan secala berkala bagi masyarakat terdampak, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Pihak nagari yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan telah mendirikan beberapa pos kesehatan darurat di titik-titik yang sangat terdampak, seperti di dekat Kantor Wali Nagari yang mengalami kerusakan.



Sumber : Dokumentasi Humas UNP

Gambar 1. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh UNP

Bencana banjir di Nagari Ganting Mudiak Utara, Surantih tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga berdampak besar pada kesehatan dan kondisi psikososial masyarakat. Banyak warga, terutama anak-anak dan lansia, mengalami penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan gangguan pencernaan akibat lingkungan yang tidak higienis. Selain itu, trauma pasca-bencana juga menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama mereka yang kehilangan rumah dan harta benda.

Pemerintah bersama tenaga medis dan relawan telah memberikan bantuan kesehatan, seperti pemeriksaan gratis, distribusi obat-obatan, serta penyuluhan tentang pencegahan penyakit pasca-banjir. Selain itu, layanan dukungan psikososial seperti sesi konseling dan trauma healing juga dilakukan untuk membantu warga, terutama anak-anak, dalam mengatasi ketakutan dan stres akibat bencana.

Meskipun bantuan ini sangat membantu, masyarakat berharap adanya pemeriksaan kesehatan berkala, kesiapan fasilitas medis yang lebih baik, serta dukungan psikososial jangka panjang agar mereka bisa benar-benar pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.

Pemulihan kesehatan dan mental masyarakat pasca-bencana membutuhkan perhatian berkelanjutan, bukan hanya bantuan sementara.

Untuk pengorganisasian, Pemerintah nagari bersama Dinas Kesehatan dan lembaga non-pemerintah mengatur pos kesehatan darurat serta menyediakan layanan psikososial secara terjadwal. Layanan psikososial diinterpretasikan sebagai bentuk pemulihan emosional dan mental masyarakat agar bisa pulih secara menyeluruh, tidak hanya secara fisik.

4) Penyediaan Hunian Sementara

Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir harus tinggal di hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah berusaha membangun rumah hunian sementara yang layak, kenyataannya masih banyak warga yang harus tinggal di tempat penampungan darurat dengan fasilitas yang minim. Beberapa rumah yang mengalami kerusakan ringan telah direnovasi, tetapi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau hilang sepenuhnya, proses pembangunan rumah permanen masih menghadapi kendala.

Keterbatasan anggaran, kurangnya bahan bangunan, serta proses administrasi yang cukup rumit membuat pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak berjalan lambat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Nikodemus El Thiaz, S.T. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan sebagai berikut :

"… Setelah fase tanggap darurat, kami segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD Provinsi, serta Kementerian PUPR untuk menyediakan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat. Selain itu, bagi rumah yang masih bisa diperbaiki, kami memberikan bantuan stimulan berupa material bangunan…" (Wawancara,21 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa BPBD berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD Provinsi serta Kementrian PUPR untuk menyediakan hunian sementara, bagi warga yang rumahnya rusak berat.



Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Gambar 2. Rumah Hunian Sementara

Berdasarkan gambat diatas merupakan hunian sementara yang dibangun dengan ukuran 6x4 yang terbuat dari papan fiber yang tahan terhadap cuaca. Meskipun sifatnya sementara, BPBD memastikan hunian sementara ini tetap nyaman, memiliki ventilasi yang baik, fasilitas sanitasi, serta akses ke air bersih. Selain itu, lokasinya juga dipilih agar tidak jauh dari fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pasar

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan tahap lanjutan dalam penanganan pasca bencana yang bertujuan untuk membangun kembali seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setelah fase tanggap darurat dan rehabilitasi dilaksanakan, rekonstruksi menjadi fondasi penting dalam menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang lebih baik daripada sebelum bencana terjadi.

Program rekonstruksi di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih meliputi beberapa aspek penting, seperti pembangunan kembali rumah warga, rehabilitasi fasilitas umum, serta peningkatan infrastruktur strategis. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah utama yang telah dilakukan dalam tahap rekonstruksi antara lain :

1) Pembangunan Kembali Rumah Warga

Salah satu fokus utama program rekonstruksi adalah pembangunan kembali rumah warga yang hancur akibat banjir. Pemerintah daerah bersama BPBD telah melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat dan sedang. Bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan serta bantuan dana stimulan bagi warga yang memenuhi syarat penerima. Namun, keterbatasan anggaran dan distribusi material yang tidak merata menyebabkan masih banyak warga yang belum mendapatkan rumah layak huni.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, bapak Nikodemus El Thiaz, S.T mengatakan bahwa :

> "… pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat banjir ini merupakan bagian dari program rekonstruksi yang kami laksanakan setelah tahap tanggap darurat dan rehabilitasi selesai. Kami mulai dengan pendataan yang dilakukan bersama aparat nagari dan tim teknis. Rumah yang rusak kami kategorikan menjadi rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk rumah rusak berat, kami upayakan pembangunan ulang di lokasi yang aman dari potensi banjir berulang …"
>
> (Wawancara 24 Januari 2025)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa warga menghadapi kesulitan dalam proses administrasi untuk mendapatkan bantuan, sehingga rekonstruksi rumah berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Hingga bulan Januari 2025, tercatat sebanyak 87 KK masih membangun rumah secara mandiri sambil menunggu pencairan dana bantuan tahap kedua dari pemerintah provinsi yang direncanakan akan turun pada pertengahan tahun. Proses pembangunan secara swadaya ini dilakukan dengan gotong royong serta menggunakan bahan seadanya, yang tentu mempengaruhi kualitas dan daya tahan bangunan yang dibangun. Pendataan kerusakan yang masih dilakukan secara manual dan tidak menggunakan teknologi, membuat pendataan kerusakan menjadi lama dan lambat.

2) **Pemulihan Infrastruktur**

Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, serta saluran irigasi mengalami kerusakan parah akibat banjir. Pemerintah bersama instansi terkait telah berupaya memperbaiki jalan utama yang menghubungkan nagari dengan daerah lain agar distribusi bantuan serta mobilitas masyarakat tidak terhambat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu bapak Nikodemus El Thiaz, S.T mengatakan bahwa :

> "… Prioritas kami ada pada tiga sektor utama yaitu jalan penghubung antar nagari, jembatan, dan fasilitas pelayanan dasar seperti puskesmas serta sekolah. Di Nagari Ganting Mudiak Utara misalnya, ada beberapa jembatan kecil yang terputus saat banjir. Itu menjadi jalur vital bagi distribusi logistik dan mobilitas warga, sehingga

langsung kami ajukan untuk rekonstruksi melalui dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB. Selain itu, kami juga memperkuat tanggul dan drainase yang sempat jebol …" (Wawancara 24 Januari 2025)



Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Gambar 3. Jembatan Penghubung Nagari

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat pemerintah daerah bersama koordinasi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pembangunan kembali jembatan yang digunakan sebagai akses ke nagari gantiang mudiak utara surantih. Jembatan juga dibuat dari bahan yang lebih kuat agar kendaraan berat bisa masuk kedalam nagari

Lalu wawancara yang dilakukan bersama Seksi Pemerintahan Kecamatan Sutera, bapak Iwal, S.Pt mengatakan bahwa :

"… Kita berupaya agar pembangunan kembali ini tidak sekadar "menambal kerusakan", tapi benar-benar menjadi peningkatan. Misalnya, jembatan yang sebelumnya hanya konstruksi kayu kini dibangun dengan struktur beton ringan yang lebih tahan terhadap arus banjir. Drainase juga ditingkatkan kapasitasnya. Bahkan ada beberapa jalan yang sekarang ditinggikan untuk mencegah genangan saat curah hujan tinggi …" (Wawancara 21 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memulai proses pembangunan kembali dengan beberapa perbaikan signifikan, seperti peningkatan jalan kampung dan pembangunan jembatan permanen dari beton. Namun, masih ada infrastruktur yang belum tersentuh secara optimal, seperti saluran irigasi yang tersumbat dan tanggul pengaman yang belum diperkuat.

3) Penguatan Sistem Mitigasi Bencana

Selain membangun kembali infrastruktur fisik, program rekonstruksi juga mencakup penguatan sistem mitigasi bencana agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Pembangunan tanggul dan drainase dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di kemudian hari. Selain itu, program edukasi kebencanaan diberikan kepada masyarakat agar mereka lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi darurat. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam implementasi strategi mitigasi bencana agar dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu bapak Nikodemus El Thiaz, S.T., menyampaikan bahwa :

> "… beberapa hal yang kami lakukan antara lain membangun kembali infrastruktur membuat jalur evakuasi yang lebih baik dan tanggul penahan banjir yang lebih kuat. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan kesiapsiagaan, serta mendampingi pemerintah nagari dalam menyusun rencana kontinjensi berbasis potensi bencana local …" (Wawancara 24 Januari 2025)



Sumber : Arsip Pribadi Penulis

Gambar 4. Kondisi Tanggul di Jalan Utama

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa belum adanya tanggul yang dibuat pasca bencana banjir di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada 21 Januari 2025, bahwa belum adanya tanggul yang dibuat oleh pemerintah setempat dan beberapa bahu jalan yang rusak masih belum diperbaiki oleh pemerintah setempat

Menurut Ibuk Rita Puspita (41 Tahun) sebagai masyarakat yang terdampak bencana, pemerintah nagari sudah mulai menunjukkan upaya melibatkan masyarakat dalam kegiatan

mitigasi, namun pembangunan infrastruktur utama seperti tanggul masih belum terealisasi, yang sebagai berikut :

> "… Selama ini kami hanya mengandalkan tanggul darurat dari karung pasir, dan itu tidak cukup. Kalau hujan deras datang lagi, pasti akan ada lagi yang terendam …" (Wawancara, 21 Januari 2025)



Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Gambar 5. Tanggul Darurat

Berdasarkan wawancara diatas, masyarakat masih menghadapi kekhawatiran yang besar karena belum adanya pembangunan tanggul permanen sebagai bentuk perlindungan struktural. Tanggul darurat yang dibuat secara swadaya oleh warga dinilai belum cukup efektif untuk mencegah potensi banjir susulan. Harapan besar disampaikan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan tanggul, mengingat hal ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir.

PEMBAHASAN

Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih menunjukkan berbagai tantangan multidimensi, baik dari aspek kelembagaan, pemahaman kebijakan, hingga keterbatasan teknis di lapangan. Temuan ini menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pelaksanaan program dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, pembahasan ini menafsirkan temuan dalam konteks teoritis dan membandingkannya dengan penelitian terdahulu guna memunculkan konsep baru dalam kerangka penanggulangan bencana berbasis komunitas dan kelembagaan daerah.

1. Aspek Organisasi: Lemahnya Struktur Pelaksana dan Koordinasi Lintas Sektor

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakterdapatannya tim khusus dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi penghambat utama. Ketiadaan struktur organisasi yang responsif menyebabkan proses koordinasi antarinstansi berjalan tidak efektif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad & Rachmann (2025) yang mengungkap bahwa struktur organisasi yang tidak adaptif dalam penanganan bencana akan menghambat kecepatan respon dan efektivitas pemulihan.

Rumagit et al. (2022) menegaskan bahwa dalam mengoperasikan sebuah program diperlukan tiga unsur pokok: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam konteks penelitian ini, unsur organisasi menjadi titik lemah paling mencolok. Oleh karena itu, perlu dilakukan redefinisi peran antar instansi serta pembentukan unit pelaksana khusus dalam struktur BPBD dan pemerintah nagari.

2. Interpretasi Kebijakan: Kesenjangan Pemahaman dan Implementasi

Meski pemerintah kabupaten hingga nagari telah memahami substansi kebijakan pemulihan pasca bencana, pelaksanaan di lapangan belum mencerminkan efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya *policy implementation gap*, yaitu kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Fenomena ini diperkuat oleh studi dari Solong & Yadi (2021) yang menyoroti bahwa keberhasilan suatu program publik tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas birokrasi dalam menjalankan instrumen tersebut. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara *policy knowledge* dan *operational capacity* agar interpretasi kebijakan tidak berhenti di tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi di level tapak (grassroots).

3. Aplikasi Teknologi dan Hambatan Teknis

Dalam hal aplikasi, tidak adanya sistem digital atau aplikasi berbasis data spasial (seperti GIS) menyebabkan pendataan dan pemetaan pasca bencana berjalan lambat dan tidak akurat. Ini sesuai dengan temuan dari Huda (2021) yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat tanggap darurat dan rekonstruksi berbasis bukti (evidence-based recovery). Hambatan geografis seperti sulitnya akses dan gangguan komunikasi juga memperparah situasi. Penelitian oleh Hadijah (2025) di wilayah rawan bencana Sulawesi Tengah membuktikan bahwa integrasi teknologi dan pelibatan masyarakat

lokal dalam pengumpulan data lapangan mampu mempercepat proses identifikasi kebutuhan dan penyaluran bantuan.

4. Dukungan Psikososial: Dimensi yang Sering Terlupakan

Penelitian ini juga menunjukkan ketiadaan dukungan psikososial bagi korban bencana. Padahal, aspek ini krusial dalam membangun ketahanan masyarakat pasca trauma bencana. Seperti diungkapkan oleh Rijanta et al. (2018), pemulihan pasca bencana harus bersifat holistik, mencakup fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Dukungan psikososial menjadi salah satu pilar dalam pendekatan *community-based disaster management* (CBDM) yang kini mulai dikembangkan dalam praktik kemanusiaan internasional (IFRC, 2020).

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Ketimpangan dan Kerentanan

Warga yang masih tinggal di hunian sementara menandakan lambatnya proses rekonstruksi. Fenomena ini sesuai dengan temuan Sutrisno (2021) yang menyatakan bahwa pemulihan infrastruktur tanpa strategi ekonomi yang komprehensif justru menciptakan ketimpangan sosial baru. Keterbatasan anggaran dan lambatnya distribusi bantuan memperpanjang masa transisi masyarakat menuju kehidupan yang layak.

KESIMPULAN

Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif berkontribusi signifikan dalam mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat terdampak. Program rehabilitasi yang mencakup kegiatan seperti pembersihan fasilitas umum, penyediaan layanan kesehatan darurat, serta dukungan psikososial terbukti mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan program rekonstruksi melalui pembangunan kembali rumah dan perbaikan infrastruktur dasar mencerminkan implementasi prinsip *build back better*, yang menekankan pada peningkatan kualitas dan ketahanan sistem pascabencana.

Pelibatan aktif masyarakat melalui mekanisme musyawarah nagari dan pembentukan tim siaga bencana lokal merupakan capaian strategis yang tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana di masa depan. Hambatan teknis seperti keterbatasan akses dan sumber

daya dapat diminimalkan melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor, yang memperlihatkan pentingnya pendekatan integratif dalam manajemen bencana.

Esensi utama dari implementasi program ini adalah pentingnya membangun ketangguhan masyarakat berbasis lokal sebagai fondasi keberlanjutan pemulihan pascabencana. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya perlu dipertahankan sebagai respons terhadap kejadian bencana, tetapi juga dikembangkan secara sistematis sebagai strategi pengurangan risiko bencana jangka panjang.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas model partisipatif ini di berbagai konteks geografis dan sosial yang berbeda, serta penguatan kebijakan berbasis data lokal dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, N. R., & Wismaningtyas, T. A. (2024). ANALISIS PENILAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM MENANGGULANGI BENCANA. *JMAN Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, *8*(2). https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/4420

Arif, M. (2019). Analisis Wilayah Berpotensi Banjir Daerah Sumatera Barat Untuk Pelaksanaan Pembelajaran Geografi Berorientasi Bencana Alam. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, *4*(1), 53–60. https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/272/183

Bunda, M. P., Zalmi, F. N. H., Rahmi, L., & Hasfera, D. (2022). RANCANGAN INDEKS PERATURAN NAGARI DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2021. *Jurnal Al-Ma'arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, *2*(1), 27–37. https://doi.org/10.37108/almaarif.v2i1.817

Fatima, I., & Sudibyo, D. P. (2023). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, *3*(1), 136–150. https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/75898

FEBRA, P. (2019). *Analisis Usaha Tani Bawang Merah (Allium cepa varascalonicum L) Dataran Rendah (Studi Kasus: Kelompok Tani Murni di Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)*. Universitas Andalas. https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/75898

Gustiawan, P., Putra, I., Ananda, A., & Montessori, M. (2024). Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir. *Journal of Education, Cultural and Politics*, *4*(4), 775–784. https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/view/586

Hadijah, S. (2025). Kajian Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. *Jurnal Sosial Teknologi*, *5*(4), 981–997. https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32082

Huda, S. (2021). Reformulasi Paradigma Dakwah Dan Komunikasi Di Era Pos-Pandemi Covid-19. *Development*, *138*, 1–11. 10.5281/zenodo.5640484

Muhammad, M. M., & Rachman, V. S. (2025). Model efektifitas keuangan dana darurat dalam mendorong pemulihan ekonomi warga desa Ciherang pasca bencana alam gempa Cianjur. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(1), 19–32.

Naibaho, R. B., Barutu, S. P., & Sitanggang, A. (2025). Analisis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Kasus Pidana Lingkungan Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *7*(2). https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/2916

Oktavianto, A. B., Rihi, D. W., Lay, M. R., Daeng, E., & Mau, A. O. E. (2025). PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MITIGASI BENCANA ALAM MAUPUN NON ALAM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(1), 501–510. https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/27994

Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). *Modal sosial dalam manajemen bencana*. UGM PRESS.

Ritonga, A. (2024). Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(1), 102–127. https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404

Sakban, A., Maemunah, M., & Hafsah, H. (2020). Peran MDMC dalam pelayanan pendidikan dan psikososial untuk anak terdampak gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Inklusif*, *1*(1), 52–61. https://prospek.unram.ac.id/index.php/inklusif/article/view/40

Septian, A. M. A., Afwani, R., & Albar, M. A. (2020). Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Korban Bencana Alam Gempa (Studi Kasus: BPBD Lombok Barat). *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, Dan Aplikasinya (JTIKA)*, *2*(2), 196–207. https://doi.org/10.29303/jtika.v2i2.101

Solong, H. A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Deepublish.

Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lembhannas RI*, *9*(1), 167–185. https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/385

Tambajong, I. L., ST, Ms., Amanda Sembel, S. T., Cynthia Wuisang, S. T., Mgt, M. U. H., Frits Siregar, S. T., Sela, R. L., Windy Mononimbar, S. T., Ir Lely Mustika, M. T., & Anggraini, N. P. (n.d.). *Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana; Perspektif Bidang Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kota*. Universitas Indonesia Publishing.

Tarigan, S. R. D. B., Stiawati, T., & Maulana, D. (2025). Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dan Solusi Masalah Gizi di Kota Serang "Endog Kepiting." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(1), 42–63. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5076

Widyaningrum, N., Kodar, M. S., Purwanto, R. S., Priambodo, A., & Fadlurrahman, I. (2020). Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *3*(1), 40–48. 10.34007/jehss.v3i1.150

Zulsfi, A., Simanjuntak, N. B. P., Sari, V. A., & Rahmi, F. (2021). Penerapan analisis geospasial berbasis Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan tingkat ancaman bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, *2*(2), 82–91. https://jgrs.eng.unila.ac.id/index.php/geo/article/view/50